

ISBN No. 979-97259-0-9

**PROSIDING****SEMINAR DAN MUSYAWARAH NASIONAL IKA UNY DALAM  
RANGKA DIES NATALIS UNY KE 38****RUANG SIDANG REKTORAT UNY  
Yogyakarta, Sabtu, 6 Juli 2002***Tema :***Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam rangka  
pencapaian kurikulum berbasis kompetensi****UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



## DAFTAR ISI

1. Sepanjang Jalan Kenangan CBSA, Kupeluk MBS <i>J.C. Tukiman Taruna</i> .....	1
2. Menyoal Isu Otonomi Sekolah : Masyarakat, Sekolah atukah Pemeritah yang Belum Siap ?, <i>Yana Karyana</i> .....	6
3. Mensiasati Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan Semangat SBM, <i>Sukardi</i> .....	13
4. Pemberdayaan Pendidikan di Daerah dalam Era Otonomi (Kasus Kebijakan di Kabupaten Banjarnegara), <i>Hadi Supeno</i> .....	21
5. Managemen Berbasis Sekolah, <i>Djohar</i> .....	28
6. Evaluasi Miskonsepsi Sebagai Metode Evaluasi Metode Evaluasi Alternatif Dalam Pembelajaran Kimia, <i>K. H. Sugiyarto</i> .....	32
7. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan SMK di DIY, <i>Ima Ismara, Samsil Hadi, Haryanto &amp; Djemari Mardapi</i> .....	44
8. Identifikasi Persepsi Guru IPA Sebagai Pengembang Kurikulum Terhadap Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Terhadap Kurikulum Berbasais Kompetensi, <i>Suciati Sudarisman</i> .....	55
9. Kurikulum Berbasis Kompetensi : Menguak Persoalan yang Masih Membelit, <i>Suparno</i> .....	65
10. Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi : antara Harapan dan Kenyataan , <i>Das Salirawati &amp; Rr. Lis Permana Sari</i> .....	71
11. Evaluasi Alternatif Untuk Pembelajaran Sains Dalam Rangka Antisipasi Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi, <i>Paidi</i> .....	79



# KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI: MENGUAK PERSOALAN YANG MASIH MEMBELIT

oleh: Suparno

Jurusan Pendidikan Fisika, FMIPA UNY

## Abstrak

*Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam bidangnya masing-masing menuntut kesiapan baik tenaga pengajar, peserta didik, media pembelajaran, petunjuk mengajar dll. Bahkan keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini tidak hanya sekedar ditentukan oleh perombakan kurikulum tetapi juga perombakan budaya belajar mengajar. Berbagai kerumitan yang akan dihadapi lembaga pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diungkapkan dalam makalah ini disertai dengan solusi alternatifnya.*

## 1. Pendahuluan

Dari Seminar Nasional Kurikulum Berbasis Kompetensi (*Competency-based Curriculum*) yang baru saja diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada tanggal 11 Mei 2002 di Auditorium UNY, terungkap berbagai kekurangan dalam penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan kekurang-tepatan pemberlakuan kurikulum ini untuk Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia. Namun demikian dalam seminar yang dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari seluruh pelosok tanah air ini juga diungkapkan akan kelebihan yang dimiliki oleh kurikulum ini dibanding dengan kurikulum berbasis proses (*Process-based Curriculum*) seperti yang selama kita terapkan.

Seperti kita ketahui kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Berjalannya proses pendidikan mengikuti rambu-rambu yang telah digariskan dalam kurikulum. Sarana dan prasarana yang harus disediakan juga harus sesuai dengan apa yang dikehendaki kurikulum. Begitu pula produk yang diharapkan dapat dihasilkan oleh proses pendidikan juga telah ditentukan terlebih dahulu dalam kurikulum, baik yang berupa Tujuan Instruksional Umum (TIU) maupun Tujuan Instruksional Khusus (TIK). Oleh karena itu banyak faktor yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan sebuah kurikulum, apalagi yang bersifat nasional.

## 2. Landasan Hukum KBK

Ketika menjelaskan *Competency-based Training* (CBT) Barry Clark menjelaskan bahwa CBT adalah sistem pelatihan yang berdasarkan atas apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh seorang siswa di dunia kerja. Dengan analogi yang sama dapat disimpulkan bahwa sebenarnya KBK adalah kurikulum yang berorientasi atas apa yang



diharapkan dapat dilakukan oleh seorang siswa di dunia kerja nantinya setelah selesai mengikuti sistem pendidikan berbasis kompetensi. Menurut SK Mendiknas 045/U/2002 kompetensi didefinisikan sebagai “seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu”.

Kurikulum Perguruan Tinggi berdasarkan SK Mendiknas nomor 232/U/2000, dibagi menjadi 5 kelompok besar yakni Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Diantara persoalan yang menonjol yang diungkapkan oleh Prof. S. Hamid Hasan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung dalam seminar tersebut adalah kesulitan dalam memisahkan beberapa mata kuliah ke dalam satu kategori saja. Mata kuliah yang termasuk dalam kategori Mata kuliah Keahlian Berkarya misalnya, tidak mungkin diajarkan secara terpisah unsur-unsurnya dari mata kuliah dalam kategori Mata kuliah Perilaku Berkarya. Begitu pula mata kuliah dalam kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian seperti Pancasila dan Agama mengandung unsur-unsur pengembangan berkehidupan bermasyarakat yang termasuk dalam kelompok MBB.

### 3. KBK versi Australia

Dalam seminar ini juga terungkap bahwa sebenarnya Kurikulum Berbasis Kompetensi ini lebih tepat untuk pengembangan pendidikan kejuruan (*vocational education*). Oleh karena itu di Australia kurikulum ini diterapkan hanya untuk TAFE (*Technical and Further Education*). TAFE ini adalah lembaga pendidikan ketrampilan untuk para penganggur (*unemployed people*) dan pekerja yang ingin meningkatkan ketrampilannya. Untuk para pekerja yang ingin meningkatkan ketrampilan mereka disediakan program *On-the Job and In-industry Training* yang menerapkan KBK (Barry Clark, 2002). Kualifikasi yang ditawarkan berbeda seperti Sertifikat I-IV hingga Diploma. Jangka waktu pelatihan juga bervariasi mulai dari beberapa minggu sampai sekitar 4 semester. KBK sesuai dengan sifat pendidikan TAFE yang berjangka pendek terutama untuk mengantisipasi kebutuhan industri akan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan tertentu. Sistem pendidikan yang didorong oleh permintaan pasar (*demand-driven education system*) (Trevor Urlwin, 2002) seperti ini sesuai untuk sistem pendidikan berjangka pendek, namun tidak sesuai untuk sistem pendidikan berjangka panjang seperti pendidikan S1 di Perguruan Tinggi yang memakan waktu 10-14 semester. Kalangan



industri tidak akan mampu menunggu begitu lama untuk mendapatkan tenaga trampil yang mereka butuhkan. Artinya ketika sarjana S1 lulus kuliah dengan ketrampilan tertentu, lowongan pekerjaan telah diisi oleh tenaga trampil yang dibina oleh lembaga pelatihan kejuruan (*vocational training institute*).

Trevor Urlwin, staf *Indonesia Australia Partnership for Skill Development* (IAPSD) mengungkapkan bahwa KBK menuntut keterlibatan lebih banyak dari kalangan industri dalam merancang, menyelenggarakan dan menentukan kriteria evaluasi produk yang dihasilkan. Industri diberi hak untuk menentukan apa yang perlu diajarkan di Perguruan Tinggi karena merekalah yang akan mempekerjakan lulusannya. Jangan sampai tidak ada kesesuaian ketrampilan yang diajarkan di PT dengan apa yang dibutuhkan oleh Industri. Hal ini tepat seperti konsep *link and match* yang dicanangkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Wardiman Jayanegara. Keterlibatan Industri yang sangat jauh dalam sistem pendidikan seperti ini masih dirasakan asing dalam sistem pendidikan kita. Selama ini kalangan industri mengeluhkan rendahnya ketrampilan lulusan perguruan tinggi, ketidak handalan ketrampilan yang mereka miliki dan kurangnya pengalaman dan ketrampilan industri dari para dosen Perguruan Tinggi. Untuk itu diperlukan kerjasama yang erat antara Perguruan Tinggi dan Industri dalam rangka meningkatkan pengalaman dan ketrampilan industri bagi para dosen dan penyelenggaraan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) bagi para mahasiswa. Satu hal yang masih harus diupayakan dengan serius karena banyak industri yang masih merasa terganggu dengan kehadiran mahasiswa KKL selama beberapa minggu di pabrik mereka dan belum tumbuhnya budaya dosen kuliah (*bukan memberi kuliah*) pengalaman dan ketrampilan industri di pabrik-pabrik. Hambatan psikologis yang sangat besar ini harus segera diatasi dengan berbagai kebijakan yang perlu digariskan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Perguruan Tinggi (PT) di satu pihak dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan kalangan Industri di pihak lain.

Bila KBK dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka lulusan perguruan tinggi akan mendapatkan ketrampilan yang handal yang diharapkan dapat langsung terjun ke dunia industri. Sehingga diharapkan semakin banyak lulusan PT yang dapat bekerja di kalangan Industri. Sebagai konsekuensi logis hal ini akan mengurangi pengangguran terdidik. Dengan demikian diharapkan produktivitas nasional akan semakin meningkat.



#### 4. Belajar KBK dari Thailand

Thailand, sebagai negara sesama anggota ASEAN dan sama-sama negara dunia ketiga telah berhasil menerapkan KBK dan Manajemen Berbasis Sekolah selama 30 tahun terakhir ini. Berbagai kemajuan telah mereka capai terutama di bidang pertanian. Mulai dari Jambu, Kelengkeng hingga Durian Bangkok yang diproduksi oleh negeri Gajah Putih merupakan bukti nyata kemajuan dunia pendidikan mereka. Akan tetapi menurut pengalaman penulis selama kunjungan ke berbagai lembaga pendidikan di beberapa propinsi di Thailand sejak dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dalam acara *Technical Exchange* yang disponsori oleh *Japan International Cooperation Agency (JICA)* bulan Februari 2002, kunci kemajuan pendidikan di Thailand bukanlah terletak pada kurikulumnya tetapi dedikasi para pelaksana kurikulum tersebut di lapangan dan partisipasi masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan mereka.

Sistem *full day school* yang mereka terapkan memaksa guru dan murid untuk berada di sekolah mulai dari pk. 08:00-15:40 selama 5-hari dari Senin hingga Jum'at. Para guru SD biasa mengajar 25 jam per minggu sedang SLTP dan SMU 21 jam per minggu. Oleh karena itu masih banyak waktu tersisa di sekolah. Waktu ini mereka pergunakan untuk mengoreksi pekerjaan siswa dan mempersiapkan bahan ajar untuk mereka. Ada 2 orang guru di *Surat Thani Primary School* yang berhasil menuliskan bahan ajar setebal lebih dari 300 halaman kuarto dalam bidang studi Bahas Inggris dan Pengalaman Hidup (*Life Experience*) tanpa mendapat imbalan apapun. Dengan kesadaran dan dedikasi yang tinggi untuk menjadikan anak didik mereka pandai mereka menulis dengan inisiatif sendiri dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekolah seperti printer, kertas, dan tintanya. Kebanggaan mereka atas hasil karya mereka untuk anak didik mereka menunjukkan dedikasi mereka yang tinggi.

Masyarakat sangat menghormati profesi guru, sama seperti mereka menghormati ulama (pendeta) mereka. Hal ini merupakan modal yang sangat berharga bagi suksesnya pembangunan di bidang pendidikan. Partisipasi masyarakat sangat mudah digerakkan untuk menunjang perkembangan pendidikan. Organisasi Orang Tua Siswa (*Student Parent's Association*) atau semacam BP3 bertemu sekali dalam satu semester untuk menghimpun dana bagi kemajuan pendidikan anak-anak mereka. Lembaga ini juga menyediakan beasiswa untuk para siswa yang orang tua mereka kurang mampu. Banyak diantara mereka yang secara individu menyumbang bangunan untuk sekolah. Dalam acara presentasi dalam rangka penerimaan tamu (*welcoming party*) di SMU Udonpittaya Nukoon, bukan musik dan gambar artis barat yang ditampilkan di layar dengan



menggunakan LCD proyektor, tetapi *Budhadasa* pendeta yang paling terkenal di propinsi Surat Thani. Dalam hati sanubari para siswa sekolah dari SD hingga PT tertanam perasaan tidak menghormati raja bila mereka berbuat tidak baik (seperti *rame*) di depan potret *Raja Bumibol Adulyadej* yang biasa mereka pasang di depan kelas.

Seperti kita ketahui KBK ini menurut Olivia (1997) telah diperkenalkan di pertengahan abad XIX oleh Herbert Spencer dan sebenarnya telah diterapkan di lingkungan IKIP tahun 1970-an akan tetapi tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. KBK ini kemudian diganti dengan Kurikulum Berbasis Proses (KBP) di tahun 1980-an dan hasilnya juga sama saja. Oleh karena itu untuk keberhasilan kurikulum apapun yang akan diterapkan dituntut upaya peningkatan dedikasi guru dan partisipasi masyarakat. Dedikasi guru tidak bisa ditingkatkan dengan menaikkan gaji. Gaji seorang guru SD-SMU lulusan sarjana di Thailand hanya sekitar 1,6 juta rupiah sedang biaya hidup di negeri ini jauh lebih mahal dari di Jakarta, namun mereka mampu menjaga dedikasi mereka. Dedikasi adalah masalah mental oleh karena itu hanya dapat dibangun lewat pembinaan mental. Cara termudah untuk meningkatkan dedikasi guru ini adalah melalui pembinaan mental agama yang dianut oleh guru yang bersangkutan. Dalam hal ini diperlukan kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional dengan Departemen Agama untuk merancang pembinaan mental dalam upaya untuk meningkatkan dedikasi guru. Penghormatan masyarakat terhadap profesi guru di Thailand yang pada akhirnya akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam meningkatkan dunia pendidikan mereka, nampaknya juga bersumber pada jiwa agama yang tertanam dalam hati mereka. Kita masih ingat ketika Thailand dihempas krisis ekonomi 1997, hampir seluruh rakyatnya berbondong-bondong menyumbangkan perhiasan mereka untuk Raja mereka demi mengatasi krisis ekonomi yang melanda negeri mereka. Hasilnya bisa kita lihat nilai Baht sekarang (1\$ US = 43 B) tidak jauh berbeda dari nilai Baht 1997 (1\$ US = 40 B). Upaya peningkatan penghormatan masyarakat terhadap profesi guru perlu difikirkan secara serius. Selain pembinaan mental agama masyarakat, peningkatan penghasilan guru boleh jadi dapat menjadikan mereka lebih terhormat di mata masyarakat yang pada gilirannya mengundang banyak putra-putri kita yang berprestasi dan berdedikasi tinggi di bidangnya untuk menjadi guru.

## 5. Penutup

Pada akhirnya keberhasilan penerapan KBK yang sekarang ini sedang dalam taraf sosialisasi terpulung kepada kita semua. Dua kata kunci *dedikasi* civitas akademika dan



*partisipasi* masyarakat (terutama masyarakat industri) telah kita maklumi bersama. Kita berharap kepada para penentu kebijakan (*policy makers*) baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif dapat mengantisipasi sedini mungkin dua persoalan mendasar di atas, sehingga uang rakyat baik yang berasal dari para pembayar pajak (*tax payers*) maupun utang pemerintah (*government loan*) dapat dipertanggung jawabkan.

#### Daftar Pustaka

- Clark, B., *Competency-Based Training (CBT), Introduction and Information*, Seminar Nasional Kurikulum Berbasis Kompetensi, UNY, Yogyakarta, 2002
- Hamid, H.S., *Kurikulum Berbasis Kompetensi Berdasarkan SK Mendiknas 232/U/2000 dan Alternatif Pemecahannya*, Seminar Nasional Kurikulum Berbasis Kompetensi, UNY, Yogyakarta, 2002
- Olivia, P.F., *Developing the Curriculum*, 4<sup>th</sup> Edition, Longman, New York, 1997
- Sukamto, *Strategi Pencapaian Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Seminar Nasional Kurikulum Berbasis Kompetensi, UNY, Yogyakarta, 2002
- Urlwin, T., *Presentation to National Seminar on Competency-Based Curriculum*, Seminar Nasional Kurikulum Berbasis Kompetensi, UNY, Yogyakarta, 2002





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Sertifikat

Diberikan Kepada :

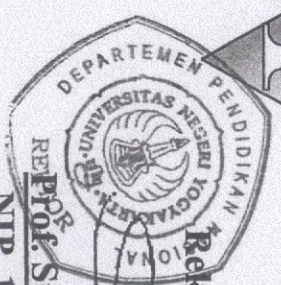
**Suparno, Ph.D**

*Juridik Fisika, FMIPA, UNY*

Pemakalah

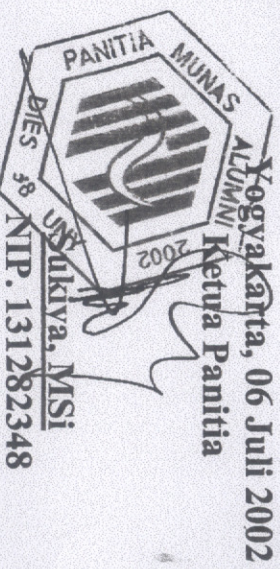
Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis UNY ke - 38  
Sabtu, 06 Juli 2002, Ruang Sidang Rektorat UNY

*Selaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Rangka Pencapaian  
Kurikulum Berbasis Kompetensi*



Rektor UNY

Prof. Suvanto, Ph.D  
NIP. 130606377



Ketua Panitia

S Sukiyu, MSi  
NIP. 131282348

B12  
9